



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT BERDIKARI  
**UNIT KERJA** : ANAK PERUSAHAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDRE ANDIKA ADHIGUNA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **1002065**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>25.582.800.000</b>
1. Tanah Seluas 672 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 268.800.000		
2. Tanah Seluas 1400 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 560.000.000		
3. Tanah Seluas 3643 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 1.457.200.000		
4. Tanah Seluas 8909 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 3.563.600.000		
5. Tanah Seluas 1575 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 630.000.000		
6. Tanah Seluas 258 m2 di KAB / KOTA GARUT, WARISAN Rp. 103.200.000		
7. Tanah dan Bangunan Seluas 497 m2/199 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 14.000.000.000		
8. Bangunan Seluas 72.4 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>784.800.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>31.890.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>211.431.747</b>



F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.060.330
Sub Total	Rp.	26.660.982.077
III. HUTANG	Rp.	578.516
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	26.660.403.561

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.